

Penerimaan Pajak Diperkirakan Lesu

Pemerintah mesti mencari sumber penerimaan baru dan membenahi sistem Coretax agar penerimaan pajak tidak lesu berkepanjangan.

JAKARTA, KOMPAS — Penerimaan pajak di awal tahun diperkirakan turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya akibat berbagai persoalan yang muncul di awal tahun. Dengan kinerja perpajakan yang lesu di awal tahun, pemerintah dinilai bakal kesulitan mengejar target penerimaan pajak pada 2025.

Beberapa faktor yang menghambat laju penerimaan pajak di awal tahun 2025 adalah sistem perpajakan baru Coretax yang sampai saat ini masih bermasalah, kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang bakal berlaku secara umum, serta dampak berlakunya formula baru tarif efektif rata-rata (TER) dalam pemungutan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPH 21).

Peneliti Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Fajry Akbar, berpendapat, penerimaan pajak pada Januari 2025 kemungkinan besar akan berkontraksi atau tumbuh negatif secara tahunan (*year on year*). Ada dua faktor besar yang menurut dia mengganggu setoran pajak.

Pertama, risiko operasional dari sistem Coretax atau Sistem Informasi Administrasi Pajak (SIAP) yang berlaku sejak 1 Januari 2025, tetapi belum siap diterapkan. Sistem tidak berjalan mulus sehingga banyak wajib pajak yang kesulitan memenuhkan kewajiban, khususnya untuk membayar dan melaporkan PPN ataupun PPh.

Sudah lebih dari satu bulan sistem berlaku, tetapi masih menghadapi berbagai kendala teknis. Akibat sistem yang tak kunjung siap, awal Februari 2025 ini pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pun sempat tetap mempertahankan sistem pajak yang lama agar tidak menghambat proses pengumpulan pajak.

Dengan demikian, saat ini ada dua sistem yang berlaku secara paralel, yakni Coretax dan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) yang selama ini dipakai. "Coretax memang didesain sebagai *game changer*. Namun, sayang, sampai sekarang, sistem itu malah menjadi masalah alih-alih menjadi solusi. Dari segi kebijakan pajak, risikonya tinggi sekali," kata Fajry saat dihubungi di Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Faktor kedua adalah koreksi dari penerimaan PPh 21 akibat mekanisme TER yang diterapkan mulai tahun 2024. Akibat mekanisme baru itu, ada selisih kelebihan pembayaran pajak yang mesti dikembalikan ke wajib pajak karyawan. Pengembalian lebih bayar pajak itu wajib dilakukan paling lambat pada Januari 2025.

Menurut Fajry, dampak koreksi PPh 21 baru terlihat awal tahun ini karena administrasi pemotongan PPh 21 di masa Desember kebanyakan baru disetorkan dan dilaporkan oleh perusahaan di bulan berikutnya alias Januari 2025.

Sulit capai target

Berkaca pada kinerja lesu di awal tahun, pemerintah dinilai bakal kesulitan mengejar target pajak 2025 yang sebesar Rp 2.189,3 triliun. Meskipun penerimaan pajak diprediksi tetap tumbuh positif sepanjang tahun, capaiannya bakal jauh dari target.

Perhitungan CITA, pemerintah membutuhkan tambahan penerimaan sebesar Rp 265 triliun dibandingkan outlook penerimaan tahun lalu untuk bisa mengejar target penerimaan 2025. Itu angka yang sulit dicapai mengingat tambahan penerimaan pada 2024 pun hanya Rp 63,1 triliun. Besarannya tidak jauh beda dari rata-rata

tambahan penerimaan prapandemi (2014-2019), yakni Rp 68,62 triliun.

"Untuk jenis pajak, penerimaan PPN & PPhBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah) akan paling berat untuk mencapai target, butuh setidaknya tambahan Rp 116,62 triliun. Kalau kenaikan tarif PPN yang lalu jadi dilaksanakan, ada tambahan penerimaan Rp 70-80 triliun, masih mungkin untuk mencapai target. Namun, sekarang jadi sulit," tutur Fajry.

Meski demikian, ia menilai PPh Badan masih bisa tumbuh positif pada 2025 dibandingkan 2024. Itu karena basis penerimaan pada 2024 yang rendah akibat terdampak moderasi harga komoditas dari 2022 ke 2023. "PPh Badan akan membaik lagi, bahkan bisa tumbuh positif. Namun, kemungkinan besar tahun ini kita akan tetap lebih banyak bergantung pada penerimaan PPN," katanya.

Efisiensi terhambat

Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional Dradjad Wibowo memperkirakan penurunan penerimaan pajak cukup besar, khususnya penerimaan pajak neto. Hal itu didasarkan pada data Modul Penerimaan Negara (MPN).

"Perbaikan Coretax tetap perlu dilakukan, tetapi perlu waktu. Sebaiknya lakukan terobosan PNBP dulu untuk beberapa bulan ini agar *cash flow* pemerintah bagus," kata Dradjad yang juga ekonom Sustainable Development Indonesia.

Menurut Dradjad, jangan sampai gara-gara MPN anjlok rencana efisiensi belanja negara Rp 600 triliun lebih menjadi tidak terwujud.

Isu kinerja penerimaan pajak yang merosot pada awal 2025 juga mencuat dalam rapat kerja Komite IV Dewan Perwakilan

Daerah (DPD) dengan jajaran Kementerian Keuangan yang digelar tertutup di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Di forum rapat, Ketua Komite IV DPD Ahmad Nawardi meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk menjelaskan perihal penerimaan negara yang turun akibat permasalahan di sistem Coretax. Ia mempertanyakan informasi yang didapat bahwa penerimaan negara di awal tahun hanya sanggup menyerah Rp 50 triliun, turun jauh dari penerimaan awal tahun 2024 yang mencapai Rp 172 triliun.

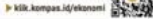
Informasi yang didapat Nawardi, setoran pajak yang anjlok itu akibat permasalahan di Coretax. Faktor pajak yang masuk ke dalam sistem hanya mampu mencapai 20 juta faktur, turun signifikan dibandingkan 60 juta faktur pada periode yang sama tahun lalu.

Namun, pertanyaan Nawardi tidak dijawab oleh Kemenkeu. "Belum dijawab sama Bu Sri Mulyani. Mungkin lupa juga karena banyak pertanyaan. Waktu beliau juga sempit sehingga saya mau memperdalam tidak cukup waktu," kata Nawardi.

Ia pun meminta pemerintah mencari sumber penerimaan baru demi menutup kinerja yang lesu di awal tahun itu.

Dihubungi terpisah, DJP Kemenkeu belum mau berkomentar ataupun membuka informasi terkait data penerimaan pajak per Januari 2025. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti hanya menjawab, "Realisasi penerimaan pajak per Januari 2025 akan disampaikan langsung oleh Menkeu melalui konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta (KITA) yang rutin dilaksanakan setiap bulan," katanya. (AG2)

Baca artikel lainnya seputar Ekonomi di Kompas.id dengan meninjau QR Code.



Moderator Khoo Ten Tan, Ketua Kadlin Indonesia Anindya Bakrie, Utusan Khusus Presiden untuk COP29 Hahim Djoghhadikusnanto, Ketua Dewan Direktur Lembaga Pengelola Investasi atau Indonesia Investment Authority (INA) Rihda DM Wirakusumah, dan Ketua Dewan Direksi Japan Bank for International Corporation (JBIC) Tadashi Maeda (dari ke kanan) menyaksikan materi pada sesi diskusi panel dalam forum Indonesia Economic Summit (IES) 2025 di Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Penerimaan Pajak Diperkirakan Lesu

Pemerintah mesti mencari sumber penerimaan baru dan membenahi sistem Coretax agar penerimaan pajak tidak lesu berkepanjangan.

JAKARTA, KOMPAS — Penerimaan pajak di awal tahun diperkirakan turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya akibat berbagai persoalan yang muncul di awal tahun. Dengan kinerja perolehan yang lesu di awal tahun, pemerintah dinilai bakal kesulitan mengejar target penerimaan pajak pada 2025. Beberapa faktor yang menghambat juga penerimaan pajak di awal tahun 2025 adalah sistem perolehan baru Coretax yang sampai saat ini masih bermasalah, kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang bakal berlaku secara umum, serta dampak belanjanya formula baru tarif efektif rata-rata (TER) dalam pemungutan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPH 21).

Peneliti Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Fajry Akbar berpendapat, penerimaan pajak pada Januari 2025 kemungkinan besar akan berkurang atau tumbuh negatif secara tahunan (*over on year*). Ada dua faktor besar yang memengaruhi da menanggapi setoran pajak.

Pertama, risiko operasional dari sistem Coretax atau Sistem Informasi Administrasi Pajak (SIAP) yang berlaku sejak 1 Januari 2025, tetapi belum siap diterapkan. Sistem tidak berjalan mulus sehingga banyak warga pajak yang kesulitan menuliskan kewajiban, khususnya untuk membayar dan melaporkan PPN ataupun PPh. Kedua, risiko operasional dari sistem Coretax atau Sistem Informasi Administrasi Pajak (SIAP) yang berlaku sejak 1 Januari 2025, tetapi belum siap diterapkan. Sistem tidak berjalan mulus sehingga banyak warga pajak yang kesulitan menuliskan kewajiban, khususnya untuk membayar dan melaporkan PPN ataupun PPh.

Bisnis Konfeksi



Pekerja sedang menjahit jersi dan kaus seperti bola di pabrik konfeksi Lino Apparel di Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat, Selasa (18/2/2025). Tren bermula sejak bola mini di Padang berlandaskan positif bagi bisnis konfeksi. Perencanaan pembuatan kaus seperti bola di Lino Apparel meningkat.

PROGRAM PEMERINTAH

Ambisi Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Terhadap Deindustrialisasi

JAKARTA, KOMPAS — Ambisi pemerintah untuk mengejar pertumbuhan ekonomi berkelanjutan hingga mencapai 8 persen selanjutnya pada 2029 akan menghadapi tantangan deindustrialisasi. Padahal, kebijakan pertumbuhan ekonomi setiap negara bertumpu pada pertumbuhan industri yang mampu menyerap tenaga kerja secara luas. Hal itu merupakan kesimpulan para peserta dalam panel diskusi bertajuk "Getting Industrial Policy Right for Indonesia" pada hari kedua Indonesia Economic Summit 2025 yang berlangsung di Jakarta, Rabu (19/2/2025). Menurut Perwakilan Organisasi Pembangunan dan Perdagangan Internasional (Unido) untuk Indonesia, Tiara Letta de Oliveira Martins, pertumbuhan ekonomi 8 persen secara berkelanjutan, bukan hanya sekadar "ujar Kaniya". Sayangnya, di tengah ambisi mewujudkan percepatan pertumbuhan ekonomi, Indonesia juga tengah menghadapi gejala deindustrialisasi. Gejala ini mengacu pada penurunan kontribusi sektor industri terhadap PDB dan menyusutnya lapangan pekerjaan di sektor manufaktur, yang mengakibatkan peningkatan ketegangan pada sektor yang kurang produktif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang 2024, industri pengalihan manufaktur (IKM) per sektor manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) harus mencapai 25 persen agar pertumbuhan ekonomi dapat

mencapai 2,08 persen. Kemudian pada 2029 kontribusi tarun menjadi 19,7 persen, dan pada 2022 turun menjadi 18,4 persen. "Perlu ada intervensi dari pemerintah karena kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB Indonesia terus menurun dari puncaknya pada tahun 2002 yang mencapai 32 persen pada saat itu," ujar Kaniya. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie mengatakan, Indonesia memiliki momentum yang tepat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tambahan sebesar 8 persen dalam beberapa tahun ke depan. Hal ini didukung oleh konsumsi domestik yang kuat, kepemimpinan yang solid, dan skala ekonomi yang besar. "Indonesia berada di antara negara-negara seperti Amerika Serikat dan India, di mana komunitas bisnis masih melihat potensi cerita pertumbuhan," ujarnya. OIG

KEBUTUHAN POKOK

Pemerintah Bakal Gelar Operasi Pasar Besar-besaran

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah akan menggelar operasi pasar besar-besaran di seluruh Indonesia mulai pekan depan untuk menstabilkan harga pangan. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Amran Sulaiman mengatakan, operasi pasar ini akan digelar di Jakarta, tetapi secara masif di seluruh Indonesia. "Stok operasi pasar tersebut, 'Stok operasi pemerintah' saat ini, misalnya, mencapai 2 juta ton. Kami juga telah menyiapkan stok Miyaoka sebanyak 70000 ton," ujarnya. Pada 12 Februari 2025, Badan Pangan Nasional (BPN) telah memfasilitasi kerja sama Bulog dan ID Food dengan Gabungan Industri Miyaoka Nabati Indonesia (GIM-NE). Bulog sanggup menstok Miyaoka sebanyak 70000 ton dan ID Food 20000 ton paling lambat pada 19 Februari 2025, ujarnya. Amran menjelaskan, operasi pasar ini akan dilaksanakan di tingkat konsumen. Di tingkat konsumen PT Pos

Indonesia PT Pos Indonesia dilibatkan karena memiliki 4800 kantor hingga pekok desa sehingga mampu mendistribusikan bahan-bahan pangan ke seluruh Indonesia. Amran juga menyampaikan perintah Presiden Prabowo Subianto, Presiden meminta para pelaku usaha menjual pangan pokok sehingga itu akan didanai Satuan Tugas Pangan Polri. Sanksinya berupa penutupan tempat usaha, ujarnya. "Kami juga akan meminta agar bahan pokok yang didistribusikan dalam operasi pasar tidak boleh diperjualbelikan kembali," tuturnya. Berdasarkan data Panel Harga Pangan Nasional, per 19 Februari 2025, harga rerata nasional beras medium di tingkat konsumen Rp 13.631 per kilogram (kg) atau 902 persen di atas HET beras medium. Harga rerata nasional kacang pangkas sumbu Rp 42.837 per kg atau 127,3 persen di atas HAP. Harga rerata gula pasir putih di tingkat konsumen Rp 18.363 per kg atau 4,95 persen

di atas HAP. Adapun harga rerata daging sapi segar Rp 134.749 per kg atau 3,52 persen di atas HAP. Mengingat data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan, harga rerata nasional Miyaoka Rp 17.200 per liter atau 8,72 persen di atas HET. Dari bulan 2024 hingga 19 Februari 2025, harga Miyaoka naik 6,17 persen. Adapun berdasarkan Proyek Negera Pangan Nasional Januari-Desember 2025 yang dimatangkan Agustus per Januari 2025, stok mayoritas pangan nasional relatif aman. Harga stok daging sapi dan kerbau, serta bawang putih sangat terbatas. Stok daging sapi dan kerbau pada awal 2025 sebanyak 65.612 ton, sedangkan kebutuhan bulannya 65.914 ton. Adapun stok bawang putih pada awal 2025 sebanyak 53.484 ton, sedangkan kebutuhan bulannya 54.478 ton. Untuk memenuhi stok kebutuhan komoditas itu, Kementerian telah menerebitkan persetujuan impor daging sapi dan kerbau sebanyak 17.000 ton, dan bawang putih 17.000 ton. Direktur Kewaspadaan Pangan dan Nutrisi Kementerian Kesehatan, selama ini, Bagawan telah menggalang gerakan pangan nasional (GPM) melalui program salah satu instrumen untuk menstabilkan pangan dan gizi masyarakat, yaitu pelaksanaan teras dimatikan. (OIG)

WARTA

Empat Bulan Kepemimpinan Teguh Setyabudi, Transformasi Jakarta Menuju Kota Global

DALAM kurang waktu empat bulan, Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi telah membawa perubahan signifikan bagi ibu kota. Mengusung kepemimpinan yang visioner dan responsif, Teguh menghadirkan kebijakan yang berfokus pada transportasi, pengendalian banjir, lingkungan, serta pelayanan publik. "Sejak dilantik, Teguh langsung turun ke lapangan untuk memastikan jalannya program prioritas, terutama dalam pemataan transportasi dan pengendalian banjir. Revitalisasi saluran air dan optimasi rumah pompa berhasil mengurangi titik titik rawan banjir. Di sektor transportasi, percepatan pembangunan infrastruktur dan integrasi antar moda membuat mobilitas warga semakin nyaman dan efisien." Komitmen Teguh dalam meningkatkan kualitas layanan publik terlihat dari perbaikan sistem perizinan dan administrasi yang lebih efisien dan transparan. Kolaborasi dengan sektor swasta, komunitas, dan akademisi turut diperkuat, menciptakan solusi inovatif dalam menghadapi tantangan perkotaan. Keadaran akan pentingnya lingkungan juga menjadi perhatian utama. Program peralihan ruang terbuka hijau (RTH), kampanye pengurangan sampah, serta pemenuhan target zero-waste. Ujarnya ini mendapat dukungan luas dari masyarakat dan membawa dampak positif terhadap kualitas udara di Jakarta. Di bawah kepemimpinan, Jakarta meraih berbagai penghargaan nasional, termasuk "Kota



Layar Anak" kategori Utama serta "Program Penghijauan Terbuka". Transformasi layanan publik berbasis digital juga mendapat apresiasi dari Kementerian PANRB, serentana peningkatan integrasi antar moda transportasi dipuji oleh Kementerian Perhubungan. Pada Desember 2024, Penjabat DKI juga meraih enam penghargaan nasional dalam satu hari, mencakup bidang keuangan daerah, pelayanan terpadu, dan inovasi pelayanan publik. Selain itu, pada siang PON XII dan Pameran XVII, Teguh memberikan penghargaan kepada atlet dan pelatih yang membawa nama Jakarta ke kancah nasional. "Sebagai pemimpin daerah yang menjangkau keterbatasan, Teguh juga mengedukasi penghargaan dari sejumlah insan pers. Dalam acara Jakarta Update, Senin (17/2/2025), para pemimpin media dari berbagai media memercikan penghargaan atas dedikasi Teguh dalam membangun komunikasi yang transparan dengan media massa." (OIG)